

Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Mengelola Pariwisata Pantai Desa Kinunang

Christilia Joy Sala¹

Herman Nayoan²

Stefanus Sampe³

Email Korespondensi: christiliasala@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja BUMDes Tasumaro dalam mengelola pariwisata pantai di Desa Kinunang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan potensi wisata desa sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Hukum Tua Desa Kinunang, serta masyarakat desa. Fokus penelitian menggunakan indikator kinerja menurut Mardiasmo, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BUMDes Tasumaro dalam mengelola pariwisata pantai di Desa Kinunang belum berjalan secara optimal. Dari aspek efektivitas, pengelolaan wisata pantai telah memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat, namun tujuan pengembangan wisata belum tercapai secara maksimal karena keterbatasan fasilitas dan pengelolaan yang masih sederhana. Dari aspek efisiensi, pemanfaatan sumber daya masih belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan kemampuan sumber daya manusia pengelola BUMDes. Dari aspek responsivitas, BUMDes telah berupaya merespons kebutuhan masyarakat dan wisatawan, tetapi pelayanan dan pengelolaan fasilitas wisata masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, pengelolaan BUMDes sudah dilakukan melalui pelaporan kepada pemerintah desa, namun transparansi dan administrasi pengelolaan usaha masih perlu diperbaiki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja BUMDes Tasumaro dalam mengelola pariwisata pantai di Desa Kinunang masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek fasilitas wisata, kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan strategi promosi wisata

Kata Kunci : Kinerja, Pariwisata, Pantai, Kinunang

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi desa, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang berbadan hukum. Hirarki dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimulai dari tingkat nasional hingga desa. Pada tingkat tertinggi, BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan utama dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya, ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada tingkat kementerian, pengaturan lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUMDes.

Pada tingkat desa, pengelolaan BUMDes diatur melalui Peraturan Desa Kinunang Nomor 11 Tahun 2023, yang menjadi dasar hukum langsung dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di desa tersebut dan struktur kepengurusan BUMDes ditetapkan melalui Keputusan Hukum Tua Desa Kinunang Nomor 5 Tahun 2023. Berdasarkan keseluruhan hirarki peraturan tersebut, BUMDes "TASUMARO" beroperasi sebagai lembaga usaha desa yang sah dan memiliki landasan hukum yang jelas mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan

pengelolaan potensi lokal, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, pembentukan BUMDes juga dimaksudkan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi desa, khususnya dalam pengelolaan sektor pariwisata pantai sebagai salah satu sumber pendapatan yang potensial. Melalui BUMDes, pemerintah desa berupaya menciptakan kemandirian ekonomi desa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan berkelanjutan. Desa Kinunang yang berada di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pariwisata pantai yang cukup menjanjikan. Pantai di Desa Kinunang memiliki keindahan alam yang masih relatif alami, dengan panorama laut, pasir pantai, serta lingkungan pesisir yang dapat menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah. Selain itu, letak geografis Desa Kinunang yang berada di wilayah pesisir menjadikan sektor pariwisata pantai sebagai salah satu potensi unggulan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian desa.

Sebagai upaya untuk mengelola potensi tersebut, pada Tanggal 25 September 2023 Pemerintah Desa Kinunang telah membentuk Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) yang di beri nama BUMDes TASUMARO, yang salah satu unit usahanya bergerak di bidang pengelolaan pariwisata pantai. Pembentukan BUMDes Tasumaro ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal,

serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata. BUMDes Tasumaro di Desa Kinunang menjalankan bentuk usaha di bidang jasa pariwisata desa. Seperti pengelolaan objek wisata pantai, meliputi pengelolaan kawasan pantai, penataan lokasi wisata, serta pemeliharaan kebersihan dan lingkungan. Adapun jasa pelayanan wisata seperti pengelolaan tiket masuk, parkir kendaraan, penyewaan fasilitas wisata (pondok/gazebo, pelampung, tikar). Adapun juga usaha pendukung seperti Penyediaan toilet umum, tempat bilas, pengelolaan kios atau lapak UMKM masyarakat, serta penyediaan fasilitas kebersihan. Usaha ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wisata lokal, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kinerja BUMDes Berdasarkan fenomena lapangan yang diamati oleh peneliti, terlihat bahwa pengelolaan pariwisata pantai di Desa Kinunang belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung wisata. Fasilitas umum seperti toilet umum, tempat sampah dan fasilitas penunjang kenyamanan pengunjung antara lain adalah gazebo masih terbatas dan belum tertata dengan baik. Kondisi ini berpotensi mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung kembali ke lokasi wisata pantai tersebut. Sistem pengelolaan yang diterapkan oleh BUMDes masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen usaha yang profesional. Perencanaan usaha pariwisata belum disusun secara sistematis dan berjangka panjang, sehingga pengembangan wisata pantai

cenderung berjalan tanpa arah yang jelas. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan potensi wisata pantai yang dimiliki Desa Kinunang.

Fenomena lain yang ditemukan di lapangan adalah keterbatasan sumber daya manusia pengelola BUMDes. Pengurus BUMDes sebagian besar berasal dari masyarakat desa yang belum memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang pengelolaan pariwisata. Kurangnya pelatihan dan pendampingan menyebabkan pengelola BUMDes mengalami kesulitan dalam mengelola usaha pariwisata secara inovatif dan kompetitif. Akibatnya, strategi promosi wisata masih sangat terbatas dan belum memanfaatkan media digital secara optimal.

Selain faktor sumber daya manusia, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai juga masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat belum terlibat secara aktif dalam kegiatan usaha pariwisata yang dikelola oleh BUMDes, baik sebagai pelaku usaha pendukung maupun sebagai mitra kerja. Menurut Ridwan (2015) keterlibatan masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism). Rendahnya partisipasi masyarakat dapat menghambat keberlanjutan pengelolaan pariwisata pantai di Desa Kinunang.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kinunang adalah belum optimalnya strategi promosi dan pemasaran wisata. Hingga saat ini, kegiatan promosi objek wisata pantai masih dilakukan secara terbatas dan belum terencana dengan baik.

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi belum dikelola secara maksimal, baik dari segi konsistensi penyebaran informasi, kualitas konten promosi, maupun jangkauan sasaran wisatawan. Selain itu, kerja sama dengan pihak luar, seperti agen perjalanan, komunitas pariwisata, maupun instansi terkait, juga masih sangat minim. Kondisi tersebut menyebabkan potensi pariwisata pantai Desa Kinunang belum dikenal secara luas oleh masyarakat dan wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Akibatnya, tingkat kunjungan wisatawan masih relatif rendah dan tidak stabil, sehingga berdampak langsung pada pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Apabila strategi promosi dan pemasaran ini tidak segera diperbaiki dan dikembangkan secara profesional, maka peluang BUMDes untuk meningkatkan kinerja usaha pariwisata serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.

Kinerja BUMDes dalam mengelola pariwisata pantai menjadi isu penting untuk dikaji karena kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa kinerja organisasi sektor publik dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain efektivitas, efisiensi, responsivitas dan akuntabilitas. Dengan menilai kinerja BUMDes berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat diketahui sejauh mana BUMDes mampu menjalankan perannya dalam mengelola pariwisata pantai di Desa Kinunang.

Penelitian mengenai kinerja BUMDes dalam mengelola pariwisata pantai menjadi sangat penting karena

dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pengelolaan pariwisata desa di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam memperbaiki tata kelola usaha pariwisata pantai. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna meningkatkan kinerja BUMDes agar mampu berkontribusi secara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kinunang, yang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pariwisata pantai dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola pariwisata pantai di Desa Kinunang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja BUMDes dalam menjalankan perannya sebagai pengelola potensi pariwisata desa, khususnya dalam meningkatkan pendapatan desa, kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir, baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model yang

dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan, tetapi juga harus dilihat dari kualitas pengelolaan serta sejauh mana kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan pariwisata pantai oleh BUMDes Desa Kinunang merupakan bentuk upaya pemerintah desa dalam mengembangkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata desa. Pengelolaan pariwisata pantai diharapkan mampu meningkatkan pendapatan desa, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan. Untuk menilai sejauh mana kinerja BUMDes dalam mengelola pariwisata pantai telah berjalan dengan baik, penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi sektor publik menurut Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa kinerja organisasi dapat diukur melalui empat indikator utama yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas. Keempat indikator tersebut dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja BUMDes dalam pengelolaan pariwisata pantai.

1) Efektivitas

Efektivitas Adalah menunjukkan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian Tingkat efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola pariwisata pantai di Desa Kinunang dapat dikategorikan cukup efektif, namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh BUMDes dalam mendukung pengembangan pariwisata desa. Program-program tersebut antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata, seperti pembangunan tangga menuju kawasan Bukit Larata serta penyediaan fasilitas gazebo sebagai tempat istirahat bagi pengunjung. Selain itu, BUMDes juga menjalankan program pemeliharaan kebersihan pantai, pengelolaan area parkir, serta pengaturan aktivitas masyarakat yang berjualan di sekitar kawasan wisata.

Dalam aspek usaha di Pariwisata Pantai, BUMDes juga mengelola penarikan tiket masuk atau karcis wisata sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sistem tiket ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mendukung keberlanjutan pengelolaan pariwisata pantai. Selain tiket masuk, terdapat pula pengelolaan retribusi parkir yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan BUMDes. Keberadaan usaha ini menunjukkan bahwa BUMDes telah berupaya mengembangkan sumber-sumber pendapatan dari sektor pariwisata. Dalam pengelolaan fasilitas, BUMDes berperan dalam menyediakan dan mengoordinasikan penggunaan fasilitas umum seperti gazebo, tempat duduk, serta kebersihan lingkungan wisata. BUMDes juga berupaya menjaga kondisi fasilitas agar tetap dapat digunakan oleh pengunjung, meskipun

dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam hal perawatan dan pengembangan fasilitas secara berkelanjutan. Beberapa fasilitas masih memerlukan perbaikan dan penambahan, seperti toilet umum, tempat sampah yang memadai, serta penataan kawasan wisata agar lebih tertib dan menarik.

Namun demikian, berdasarkan data keuangan tahun 2025 yang diperoleh peneliti, tidak ditemukan adanya pemasukan atau kontribusi yang signifikan dari penggunaan fasilitas gazebo. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas gazebo yang telah disediakan oleh BUMDes belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengunjung. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pengunjung cenderung lebih memilih menggunakan pondok atau tempat istirahat yang disediakan oleh masyarakat setempat di sekitar kawasan pantai. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan gazebo belum mampu bersaing atau belum sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengunjung, baik dari segi kenyamanan, lokasi, maupun pengelolaannya.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penyediaan fasilitas oleh BUMDes dengan kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, fasilitas yang telah dibangun belum memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan BUMDes maupun kenyamanan pengunjung. Kondisi ini menjadi salah satu indikator bahwa efektivitas pengelolaan fasilitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal perencanaan, pemanfaatan, dan evaluasi fasilitas wisata.

Di sisi lain meskipun pengelolaan pariwisata pantai telah memberikan dampak positif terhadap

perekonomian masyarakat, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum dirasakan secara merata oleh seluruh warga desa. Hal ini terlihat dari hanya sebagian masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi wisata, seperti berjualan makanan dan minuman. Sementara itu, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh manfaat ekonomi secara langsung karena keterbatasan akses, peluang usaha, atau keterlibatan dalam pengelolaan BUMDes.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun BUMDes telah menjalankan berbagai program, usaha tiket masuk (karcis), serta pengelolaan fasilitas dalam mendukung pengembangan pariwisata pantai, tingkat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas, pengelolaan usaha yang lebih optimal, pemanfaatan fasilitas yang sesuai kebutuhan pengunjung, pemerataan manfaat ekonomi, serta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal

2) Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara input dan output. Organisasi yang efisien mampu menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan BUMDes di Desa Kinunang menunjukkan bahwa penggunaan dana, tenaga kerja, dan fasilitas telah dilakukan secara cukup efisien, terutama dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Pengelolaan dana dilakukan dengan cara memprioritaskan

kebutuhan yang paling mendesak, seperti perbaikan fasilitas dan penyediaan sarana dasar pendukung wisata. Berdasarkan data keuangan tahun 2025 yang diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa penggunaan dana, baik dari sisi pemasukan maupun pengeluaran, telah dikelola dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pencatatan yang menunjukkan alur pemasukan dari kegiatan pariwisata, seperti tiket masuk, serta pengeluaran yang digunakan untuk mendukung operasional dan perbaikan fasilitas wisata. Pengelolaan tersebut mencerminkan adanya upaya BUMDes dalam mengatur keuangan secara efisien sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Dalam aspek pengelolaan fasilitas, BUMDes juga melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyediaan sarana pendukung wisata. Salah satu bentuk perbaikan tersebut adalah pembuatan portal atau pos penjagaan karcis di pintu masuk kawasan wisata. Portal ini berfungsi sebagai titik kontrol keluar-masuk pengunjung sekaligus tempat petugas melakukan penarikan tiket secara tertib, sehingga dapat meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi.

Selain itu, BUMDes menyediakan sarana dasar pendukung wisata seperti tempat sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan, toilet umum bagi pengunjung, serta tempat duduk atau area istirahat sederhana. Penataan area parkir juga dilakukan agar lebih terorganisir, sehingga memudahkan pengunjung dan mengurangi kepadatan kendaraan di lokasi wisata. Penyediaan sarana ini menunjukkan bahwa BUMDes telah memanfaatkan sumber daya yang ada

untuk menunjang kenyamanan dan kepuasan pengunjung secara efisien.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia, BUMDes melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam kegiatan operasional. Masyarakat dilibatkan sebagai petugas penjaga karcis, petugas parkir, petugas kebersihan pantai, serta membantu dalam pengawasan dan pelayanan kepada pengunjung. Selain itu, masyarakat juga turut berperan dalam pemeliharaan fasilitas, seperti perbaikan gazebo, pembersihan area wisata, serta penataan lingkungan sekitar pantai.

Pelibatan masyarakat ini menunjukkan bahwa BUMDes mampu memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien tanpa harus mengeluarkan biaya tenaga kerja yang besar, sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Namun demikian, efisiensi pengelolaan masih memiliki beberapa kelemahan, khususnya dalam aspek perencanaan keuangan jangka panjang. Penggunaan dana yang masih berfokus pada kebutuhan mendesak menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum dilakukan secara strategis dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada tertundanya pengembangan fasilitas lainnya.

Selain itu, sistem administrasi dan pencatatan keuangan belum sepenuhnya tertata dengan baik. Hal ini terlihat dari keterbatasan data laporan keuangan yang hanya tersedia pada periode tertentu, sehingga menunjukkan kurangnya konsistensi

dalam pencatatan. Kondisi ini dapat mempengaruhi transparansi serta efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes.

Dengan demikian, efisiensi pengelolaan BUMDes di Desa Kinunang dapat dikatakan cukup baik dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas, didukung oleh pengelolaan keuangan tahun 2025 yang telah berjalan dengan baik. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal perencanaan keuangan jangka panjang, pengelolaan administrasi yang lebih sistematis, serta keberlanjutan program agar efisiensi pengelolaan dapat tercapai secara lebih optimal.

3) Responsivitas

Responsivitas menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengenali dan merespons kebutuhan, tuntutan, serta aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan hasil penelitian, BUMDes di Desa Kinunang menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik dalam pengelolaan pariwisata pantai.

Hal ini terlihat dari kemampuan BUMDes dalam menerima dan menindaklanjuti masukan serta keluhan masyarakat dan wisatawan. Setiap permasalahan yang muncul umumnya dibahas dalam rapat pengurus untuk kemudian dicarikan solusi, seperti perbaikan fasilitas yang rusak (misalnya perbaikan gazebo, tempat duduk, serta fasilitas umum lainnya), peningkatan kebersihan lingkungan pantai melalui kegiatan pembersihan rutin, serta penataan pelayanan kepada pengunjung seperti pengaturan parkir dan penertiban area berjualan. Selain itu, BUMDes juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat guna mempercepat proses penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan.

Responsivitas BUMDes juga tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Dalam kegiatan operasional, masyarakat dilibatkan sebagai petugas penjaga karcis di pintu masuk, petugas parkir, petugas kebersihan pantai, serta membantu dalam pengawasan dan pelayanan kepada pengunjung. Melalui keterlibatan tersebut, BUMDes dapat lebih mudah mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang terjadi secara langsung di lokasi wisata.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pelayanan, BUMDes juga melakukan beberapa langkah seperti meningkatkan kebersihan area wisata, memperbaiki fasilitas yang kurang layak, memberikan pelayanan yang lebih ramah kepada pengunjung, serta menata area wisata agar lebih tertib dan nyaman. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan wisatawan serta menciptakan pengalaman berkunjung yang lebih baik.

Namun demikian, responsivitas BUMDes masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah belum optimalnya kecepatan dalam penanganan masalah tertentu, terutama yang berkaitan dengan perbaikan fasilitas dan peningkatan pelayanan. Selain itu, belum adanya sistem pelayanan yang terstandar juga menyebabkan kualitas respon yang diberikan masih bergantung pada kondisi dan situasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam sistem pelayanan, seperti penyusunan standar operasional prosedur (SOP) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar BUMDes dapat memberikan respon yang lebih cepat, tepat, dan profesional. Dengan demikian, tingkat kepuasan wisatawan dapat meningkat

dan pengelolaan pariwisata pantai menjadi lebih berkualitas.

Secara keseluruhan, responsivitas BUMDes dalam pengelolaan pariwisata pantai di Desa Kinunang sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi kepada publik, baik dari segi pengelolaan keuangan, program, maupun kebijakan yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian, BUMDes di Desa Kinunang telah menunjukkan adanya upaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pariwisata pantai.

Hal ini terlihat dari adanya pencatatan kegiatan dan keuangan serta penyampaian laporan kepada pemerintah desa melalui rapat atau evaluasi bersama. Laporan tersebut mencakup pemasukan dari kegiatan pariwisata, seperti tiket masuk, serta pengeluaran untuk operasional dan perbaikan fasilitas. Pengeluaran operasional yang dimaksud antara lain digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas wisata seperti gazebo dan tempat duduk, penyediaan dan pengangkutan tempat sampah, biaya kebersihan lingkungan pantai, penyediaan air bersih, serta kebutuhan operasional lainnya seperti perlengkapan kerja dan alat kebersihan. Selain itu, BUMDes juga menunjukkan sikap terbuka kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi terkait kegiatan dan perkembangan pengelolaan pariwisata melalui pertemuan atau komunikasi langsung.

Meskipun demikian, dalam hasil yang diteliti akuntabilitas pengelolaan BUMDes masih belum sepenuhnya

optimal. Hal ini terlihat dari belum lengkapnya sistem pencatatan keuangan serta kurangnya dokumentasi laporan yang dilakukan secara berkelanjutan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi yang diterapkan belum sepenuhnya tertata secara sistematis dan konsisten. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tingkat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes, serta dapat menghambat proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem administrasi dan pelaporan, seperti penyusunan laporan keuangan yang lebih lengkap, terdokumentasi dengan baik, serta dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

Kesimpulan

inerja BUMDes dalam pengelolaan pariwisata pantai di Desa Kinunang dapat dikategorikan cukup efektif, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari berbagai program yang telah dilaksanakan, seperti pembangunan fasilitas pendukung wisata, pengelolaan tiket masuk, serta upaya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Namun, efektivitas tersebut masih terbatas karena belum optimalnya pemanfaatan fasilitas, seperti gazebo yang kurang diminati pengunjung, serta belum meratanya manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengunjung serta ditingkatkan dalam hal pemerataan manfaat ekonomi.

Pengelolaan BUMDes dalam aspek efisiensi dapat dikatakan cukup baik, terutama dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Hal ini terlihat dari

pengelolaan dana yang diprioritaskan pada kebutuhan mendesak serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan operasional untuk menekan biaya. Berdasarkan data keuangan tahun 2025, pengelolaan pemasukan dan pengeluaran telah berjalan dengan cukup baik. Namun, efisiensi masih memiliki kelemahan, khususnya dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan sistem administrasi yang belum tertata secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan pengembangan fasilitas belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Secara umum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kinunang perlu melakukan peningkatan dalam pengelolaan pariwisata pantai agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Dalam aspek efektivitas, BUMDes perlu melakukan evaluasi terhadap program dan fasilitas yang telah dibangun, khususnya fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti gazebo. Selain itu, pengelolaan wisata perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengunjung serta memperluas keterlibatan masyarakat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh warga desa.

Dalam aspek efisiensi, BUMDes disarankan untuk menyusun perencanaan keuangan jangka panjang yang lebih strategis, sehingga pengelolaan dana tidak hanya berfokus pada kebutuhan mendesak, tetapi juga pada pengembangan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, sistem administrasi dan pencatatan keuangan perlu ditingkatkan agar lebih

sistematis, lengkap, dan konsisten dari tahun ke tahun.

Daftar Pustaka

- Amalia, S. P. (2024). Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengelolaan Waterpark Tirtoredjo Di Desa Sudimoro Kabupaten Magelang. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip, Universitas Diponegoro, .
- Andrews, R., & Boyne, G. A. (2010). Capacity, leadership, and organizational performance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(2), 443–471.
- Dewi, E., & Pradana, G. W. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lontar Sewu. S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.
- Dwiyanto. (2015). Manajemen pelayanan publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunn, C. A. . (2002). *Tourism planning: Basics, concepts, cases*. New York: Routledge.
- Mashun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* . Yogyakarta: BPFE.
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novianti, N. A., Putu Budiarta, I., & Ujjanti, N. P. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengelolaan Keuntungan Objek Wisata di Desa Ekasari Kabupaten

- Jembrana. Jurnal Konstruksi Hukum.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Poister, T. H. (2010). Performance management and measurement in public organizations. *Public Performance & Management Review*, 33(4), 515–534.
- Ridwan, Z. (2015). BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2).
- Ridwan, R. (2014). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Suansri, P. . (2003). *Community based tourism handbook*. k.
- Suansri, P. . (2003). *Community based tourism handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour (REST).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. . (2015). Performance management in the public sector. *Public Administration*, 93(4), 1011–1029.
- Wibowo. (2016). *Manajemen kinerja*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Widjaja, H. (2012). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*.
- Yin, R. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. housand Oaks: Sage Publications.
- Yoeti, O. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.